



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Pemanfaatan Media Digital Oleh Pemerintah Indonesia Dalam  
Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri Pasca Pandemi  
COVID-19**

Skripsi

Oleh

Martinus Wage Meka

2017330217

Bandung

2022



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Pemanfaatan Media Digital Oleh Pemerintah Indonesia Dalam  
Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri Pasca Pandemi  
COVID-19**

Skripsi

Oleh

Martinus Wage Meka

2017330217

Pembimbing

Dr. Atom Ginting Munthe, M.S.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

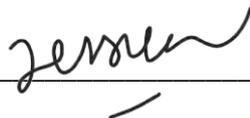
Nama : Martinus Wage Meka  
Nomor Pokok : 2017330217  
Judul : Pemanfaatan Media Digital Oleh Pemerintah Indonesia Dalam  
Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri Pasca Pandemi COVID-19

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Senin, 4 Juli 2022  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Jessica Martha, S.IP., M.I.Pol.

: 

**Sekretaris**

Dr. Atom Ginting Munthe

: 

**Anggota**

Prof. Sukawarsini Djelantik, Dra, M.Int.S, Ph.D.

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Martinus Wage Meka  
NPM : 2017330217  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Pemanfaatan Media Digital Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri Pasca Pandemi COVID-19

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Juni 2022



(Martinus Wage Meka)

## ABSTRAK

Nama : Martinus Wage Meka  
NPM : 2017330217  
Judul : Pemanfaatan Media Digital Oleh Pemerintah Indonesia  
Dalam Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri Pasca  
Pandemi COVID-19

---

Diplomasi digital hadir sebagai bagian dari perkembangan teknologi dan ilmu komunikasi. Perlindungan WNI di luar negeri menjadi salah satu fokus politik luar negeri Indonesia pasca pandemi terjadi. Guna menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana pemanfaatan media digital oleh Pemerintah Indonesia dalam perlindungan warga negara di luar negeri pasca pandemi Covid-19 tahun 2020-2021?”, penelitian ini mengimplementasikan konsep diplomasi digital, agenda-setting, dan network society yang melibatkan Kementerian Luar Negeri sebagai aktor yang menjalankan aktivitas diplomasi digital. Adapun penggunaan media yang digunakan oleh Kemlu sendiri diantaranya adalah media sosial Instagram, serta layanan aplikasi digital Safe Travel dan portal Peduli WNI. Dari hasil penelitian, aktivitas diplomasi digital yang dijalankan oleh Kemlu terlihat dari hadirnya media-media digital sebagai sistem perlindungan bagi warga negara di luar negeri, dan juga media sebagai alat diplomasi digital. Selain itu, dengan menggunakan konsep agenda-setting, media sosial Instagram menjadi media yang efektif dalam penyampaian informasi, dan penyusunan agenda-agenda yang berkaitan dengan aktivitas diplomasi Indonesia pasca pandemi terjadi. Dari beberapa agenda tersebut, agenda #NegaraMelindungi sebagai agenda perlindungan warga negara menjadi agenda yang paling banyak mendapat perhatian dari publik. Sementara itu, aplikasi Safe Travel dan portal Peduli WNI juga menjadi efektif dan efisien sebagai sebuah sistem perlindungan warga negara di luar negeri karena dapat mewujudkan sistem pelayanan dan perlindungan bagi warga negara dengan lebih baik.

**Kata Kunci:** Diplomasi digital, pandemi, Covid-19, perlindungan, media digital.

## ABSTRACT

Name : Martinus Wage Meka  
NPM : 2017330217  
Title : *Utilization of Digital Media by the Government of Indonesia in the Protection of Citizen Abroad After the COVID-19 Pandemic*

---

*Digital diplomacy is present as part of the development of communication technology and science. Many countries then began to use digital media in implementing foreign policy and achieving national interests, including Indonesia. Protection of Indonesian citizens abroad has become one of the focuses of Indonesia's foreign policy after the pandemic occurred. In order to answer the research question "How is the use of digital media by the Government of Indonesia in protecting citizens abroad after the Covid-19 pandemic in 2020-2021?", this research implements the concept of digital diplomacy, agenda-setting, and a network society involving the Ministry of Foreign Affairs as actors who carry out digital diplomacy activities. The use of media used by the Ministry of Foreign Affairs itself includes social media Instagram, as well as the Safe Travel digital application service and the Peduli WNI portal. From the research results, the digital diplomacy activities carried out by the Ministry of Foreign Affairs can be seen from the presence of digital media as a protection system for citizens abroad, as well as the media as a digital diplomacy tool. In addition, by using the concept of agenda-setting, social media Instagram has become an effective medium in conveying information and preparing agendas related to Indonesia's diplomatic activities after the pandemic occurred. Of the several agendas, the #NegaraMelindungi agenda as an agenda for protecting citizens is the agenda that gets the most attention from the public. Meanwhile, the Safe Travel application and the Peduli WNI portal have also become effective and efficient as a system for protecting citizens abroad because they can create a better service and protection system for citizens.*

**Keywords:** *Digital diplomacy, pandemic, Covid-19, protection, digital media.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sehingga segala sesuatu dalam proses dan pengerjaan penelitian yang berjudul “Upaya Diplomasi Digital Indonesia Dalam Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri Pasca Pandemi COVID-19” dapat selesai dengan baik. Adapun penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menerima baik segala bentuk masukan, kritikan, dan saran yang dapat membantu menyempurnakan penelitian ini. Lebih dari itu, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Terima kasih.

Bandung, 14 Juni 2022

Martinus Wage Meka

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan penyertaan-Nya, saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas perlindungan dan kesehatan, sehingga dalam proses pengerjaan tidak ada kendala yang membuat pengerjaan dapat berjalan dengan baik.*

*Kepada keluarga saya, Pak Ignas, Ibu Rospita, Adek Irene, atas dukungan yang diberikan selama ini baik materil maupun moril. Terima kasih karena sudah menjadi harapan dan motivasi saya untuk menyelesaikan pendidikan sarjana saya, dan juga semangat untuk Adek Irene dengan kuliahnya, semoga lancar. Juga kepada keluarga besar, Oppung, Ante, Om, dan semua saudara sepupu keluarga Op. Simanjuntak. Terima kasih atas semangat dan dukungan yang diberikan selama ini.*

*Kepada dosen pembimbing saya, Bang Atom. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan selama pengerjaan skripsi. Terima kasih juga sudah mau meluangkan waktu dan memberikan motivasi di tiap bimbingannya. Salam sehat, Bang!*

*Kepada dosen-dosen HI UNPAR, terima kasih untuk segala ilmu, pengetahuan, pembelajaran, dan pengalaman yang diberikan selama kuliah. Pembelajaran dan pengetahuan yang diberikan sangat membantu saya untuk lebih berkembang secara wawasan dan pengetahuan. Terima kasih banyak!*

*Kepada teman-teman APM & SPN UNPAR angkatan 2017, terima kasih atas kebersamaan yang kita lalui bersama selama ada di Bandung. Senang bisa mengenal kalian semua, dan sukses untuk perjalanan hidup selanjutnya!*

*Kepada kawan-kawan SMA, Seno, Pio, Kevin, Bagas, Nando, dan yang lain, terima kasih juga sudah membantu selama seminar di Padang. Semoga sukses juga dengan apa yang dikerjakan kedepannya. Terima kasih!*

*Kepada Bukit Sastra 92, Pa Asep dan semua orang yang ada didalamnya. Terima kasih atas kebersamaanya selama nge-kos sejak 2018. Terima kasih juga atas segala bantuan yang diberikan sejak 2018 hingga 2022, semoga Tuhan memberkati.*

*Kepada kawan-kawan HI 17. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang dilalui baik yang kenal maupun tidak. Senang bisa mengenal orang baru dan lingkungan baru. Semoga sukses terus kedepannya.*

*Untuk diri sendiri, terima kasih sudah mau berjuang selama ini. Perjalanan kuliah yang penuh perjuangan tentu tidak mudah, terima kasih sudah mau bersabar dan melewati semua. Mengenal teman baru dan lingkungan baru di Bandung, Beman, Carlos, Blessing, pokoknya kawan-kawan aing lah. Sukses terus nyakk!!!*

*Signing off,*

*2017330217*

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR SINGKATAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.2.1 Deskripsi Masalah .....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	9
1.2.3 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Kajian Literatur .....	11
1.5 Kerangka Pemikiran .....	16
1.6 Metode Penelitian.....	21
1.6.1 Metode Penelitian.....	21
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data .....	22
1.7 Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II PANDEMI, POLITIK LUAR NEGERI DAN DIPLOMASI DIGITAL INDONESIA.....	25
2.1 Sejarah dan Perkembangan Pandemi COVID-19.....	26
2.2 Pandemi COVID-19 Sebagai Sebuah Isu Global.....	28
2.3 Permasalahan Yang Dialami Indonesia Dampak Pandemi COVID19 ..... .....	31

2.4 Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) .....	33
2.5 Diplomasi Digital Indonesia .....	37
BAB III UPAYA DIPLOMASI DIGITAL INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN WNI SELAMA PANDEMI COVID-19 .....	42
3.1 Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Upaya Perlindungan WNI Pasca Pandemi COVID-19.....	43
3.2 Peran Kementerian Luar Negeri Indonesia.....	46
3.3 Upaya Diplomasi Digital Pemerintah Indonesia Dalam Perlindungan WNI di Luar Negeri Pasca Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 .....	49
3.3.1 Melalui Media Sosial <i>Instagram</i> .....	49
3.3.2. Melalui Aplikasi <i>Safe Travel</i> .....	56
3.3.3. Melalui Portal Peduli WNI.....	58
BAB IV KESIMPULAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Grafik kasus covid secara global .....	27
Gambar 2. 2 Grafik kematian covid secara global.....	27
Gambar 2. 3 Index diplomasi digital tahun 2021.....	39
Gambar 3. 1 Akun instagram resmi Kemlu RI .....	53
Gambar 3. 2 Perlindungan WNI oleh @kemlu_ri .....	55
Gambar 3. 3 Aset Digital Kemlu.....	58
Gambar 3. 4 Alur permohonan perlindungan dan pengajuan pelayanan .....	60

## DAFTAR SINGKATAN

WHO	<i>World Health Organization</i>
PPTM	<i>Pernyataan Pers Tahunan Menlu</i>
WNI	<i>Warga Negara Indonesia</i>
Kemlu	<i>Kementerian Luar Negeri</i>
Menlu	<i>Menteri Luar Negeri</i>
FCO	<i>Foreign Commonwealth Office</i>
TKI	<i>Tenaga Kerja Indonesia</i>
PTRI	<i>Perutusan Tetap Republik Indonesia</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pandemi didefinisikan sebagai sebuah wabah penyakit yang dapat menyebar ke banyak negara hingga benua.<sup>1</sup> Beberapa karakteristik suatu fenomena dapat dikatakan sebagai sebuah pandemi di antaranya adalah, ekstensi geografi yang luas, adanya penyebaran dan pergerakan penyakit, tingkat serangan dan ledakan yang tinggi, kekebalan populasi yang minimal, adanya kebaruan, infeksi, adanya penularan, dan juga penyakit yang berakibat parah atau fatal.<sup>2</sup> Pandemi juga menjadi sebuah kata yang bertujuan dalam informasi dan komunikasi kepada masyarakat, terutama dalam ilmu kesehatan, sebagai sebuah pemicu untuk kesadaran dan tanggungjawab kesehatan publik secara luas.

Memasuki awal tahun 2020, masyarakat secara global dikejutkan dengan kemunculan sebuah varian virus baru yang menyerang sistem pernapasan manusia. Kasus ini pada awalnya ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Komisi kesehatan Wuhan melaporkan ditemukan adanya klaster dari beberapa kasus yang menyebabkan peradangan pada sistem paru-paru manusia.<sup>3</sup> Sejak itu, penyebaran virus pun semakin membesar dan menyebar ke

---

<sup>1</sup> <https://www.webmd.com/cold-and-flu/what-are-epidemics-pandemics-outbreaks> diakses pada 31 Oktober 2021

<sup>2</sup> David M. Morens, Gregory K. Folkers, dan Anthony S. Fauci, "What Is a Pandemic?," *The Journal of Infectious Diseases*, Vol.200, Issue 7, (2009)

<sup>3</sup> <https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19> diakses pada 25 September 2021

seluruh Tiongkok, hingga akhirnya pada 11 Januari 2020, kasus kematian pertama yang disebabkan virus Covid-19 dilaporkan terjadi di Tiongkok. Seiring dengan Bergeraknya jutaan manusia yang bepergian dari satu negara ke negara lain, sejumlah negara juga melaporkan dan mengkonfirmasi kasus-kasus yang terjadi di masing-masing negara, seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Thailand.<sup>4</sup>

Sejak itu, rentetan kejadian yang bermula dari penyebaran virus mulai terjadi di banyak negara. Hal ini dikarenakan penyebaran virus yang sangat cepat karena bisa bertransmisi dari manusia ke manusia, hingga akhirnya *World Health Organisation* (WHO) menyerukan bahwa situasi ini sebagai *public health emergency*. Situasi darurat juga sudah mulai diberlakukan seperti karantina berskala nasional di Wuhan, pembatasan perjalanan atau *travel restriction*, dan pada 11 Maret 2020, WHO mendeklarasikan virus Covid-19 sebagai pandemi global.<sup>5</sup>

Krisis kesehatan global ini kemudian menyebabkan banyak ketidakstabilan yang dialami semua negara. Dalam artikel jurnalnya, W. Qiu mengatakan pandemi dapat memberikan dampak negatif yang sangat serius bagi masyarakat global.<sup>6</sup> Pandemi menginfeksi jutaan orang, menyebabkan penyakit serius yang menyebar dalam cakupan populasi yang besar, dan menyebabkan ribuan kematian. Ancaman juga terasa tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi ekonominya. Kerugian ekonomi dapat mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian, yang dapat

---

<sup>4</sup> <https://www.nytimes.com/article/coronavirus-timeline.html> diakses pada 25 September 2021

<sup>5</sup> <https://www.ajmc.com/view/a-timeline-of-covid19-developments-in-2020> diakses pada 25 September 2021

<sup>6</sup> W. Qiu; S. Rutherford; A. Mao; C.Chu, "*The Pandemic and its Impact*," Vol 9-10 (2016-2017)

disebabkan melalui biaya langsung, beban jangka panjang, dan biaya tidak langsung. Selain itu, dampak sosial dari terbatasnya akses perjalanan, fasilitas umum seperti sekolah, pasar, juga tempat olahraga juga mejadi permasalahan yang serius.

Perlindungan warga negara kemudian menjadi sebuah isu baru bagi negara-negara di tengah pandemi saat ini, misalnya Indonesia. Sebagai sebuah negara dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa penduduk<sup>7</sup> yang tersebar di dalam dan luar negeri, menjadi sebuah kewajiban bagi negara dalam melindungi warga negaranya. Menanggapi krisis global ini, politik luar negeri Indonesia terlihat berfokus ke dalam beberapa kepentingan. Pada awal tahun 2020, politik luar negeri Indonesia mengalami beberapa penyesuaian dalam merespon situasi pandemi. Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2020, diplomasi Indonesia dijalankan berdasarkan prioritas 4+1, diantaranya adalah memperkuat diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta peran Indonesia di kawasan serta global. Kebijakan *plus* satu tersebut juga termasuk dengan penguatan infrastruktur diplomasi. Untuk diplomasi perlindungan, Menteri Luar Negeri (Menlu) mengatakan penguatan terhadap isu perlindungan sangat diperlukan. Oleh karenanya, strategi perlindungan juga dilakukan secara holistik baik di tingkat domestik maupun internasional.<sup>8</sup> Pernyataan tersebut juga didukung dengan aktivitas presiden Jokowi yang beberapa kali melakukan pertemuan dengan perwakilan negara lain dan membahas mengenai perlindungan warga negara. Ia

---

<sup>7</sup> <https://www.census.gov/popclock/> diakses pada 31 Oktober 2021

<sup>8</sup> <https://www.republika.co.id/berita/q3sh76382/kemenlu-tetapkan-prioritas-politik-luar-negeri-2020> diakses pada 29 Oktober 2021

juga mengatakan Indonesia akan berupaya melakukan segala cara dalam upaya perlindungan dan pemulangan warga negara yang terjebak di luar negeri.

Penyebaran covid yang begitu cepat membuat terbatasnya ruang gerak masyarakat secara umum. Aktivitas yang biasa dilakukan dengan kontak langsung perlahan mulai bergeser dengan menggunakan interaksi virtual dengan mengandalkan perkembangan ilmu teknologi yang serba digital. Sehingga demikian, perkembangan ilmu teknologi dan juga perkembangan dunia digital berperan penting dalam menjaga berlangsungnya aktivitas masyarakat, terutama di Indonesia. Hal ini terlihat dengan bertumbuhnya pengguna internet di Indonesia per Januari 2021, sebesar 15,5 persen atau 27 juta orang selama pandemi. Sementara pengguna media sosial aktif juga ikut tumbuh 6,3 persen atau 10 juta orang.<sup>9</sup>

Selain itu, hadirnya media sosial sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut membantu masyarakat dalam menjalani dan memantau kondisi saat ini. Tak terkecuali dengan aktor-aktor yang lebih besar dari masyarakat seperti pemerintah atau negara. Memanfaatkan perkembangan teknologi, negara turut serta hadir dan tetap menjalankan kewajibannya dalam upaya untuk bertahan selama pandemi. Dimana saat ini, media sosial hadir sebagai alat negara untuk tetap berdiplomasi dalam hubungan internasional melalui dunia virtual. Misalnya dalam kasus revolusi yang pernah terjadi di Tunisia, media sosial memiliki peran dalam membantu masyarakat dalam membentuk perubahan pada negara yang otoriter menjadi pemerintahan yang lebih responsif terhadap

---

<sup>9</sup> <https://www.industry.co.id/read/87510/selama-pandemi-pengguna-internet-di-indonesia-tumbuh-155-persen> diakses pada 25 September 2021

kepentingan rakyat. Dalam hal ini, teknologi membantu meningkatkan perhatian masyarakat dalam isu nasional maupun global, ditambah lagi dengan media sosial yang membantu mempercepat adanya gerakan-gerakan sosial.<sup>10</sup>

Dampak dari krisis global ini merambat ke banyak sektor dan bidang, termasuk salah satunya perlindungan kemanusiaan. Penelitian ini juga menarik karena jika dilihat dari situasi di bahkan sebelum pandemi dimulai, Indonesia bergerak cepat untuk mengantisipasi dan mengamankan warga negara yang berada di Tiongkok. Dilansir dari BBC Indonesia, pada tanggal 31 Januari 2020, Indonesia sudah berupaya untuk melakukan pemulangan bagi para warga negara yang berada di Provinsi Hubei, China. Menlu Retno Marsudi mengatakan ada sebanyak 245 WNI di Provinsi Hubei, ditambah dengan lima anggota tim aju yang kemudian akan dipulangkan ke Indonesia.<sup>11</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan Indonesia dalam krisis global dan mencapai kepentingan nasional melalui pemanfaatan digital.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

### **1.2.1 Deskripsi Masalah**

Dengan cepatnya penyebaran pandemi di awal tahun 2020, menyebabkan banyak kekacauan dalam ruang lingkup kecil hingga lingkup internasional. Cepatnya penyebaran virus yang tidak dapat dikontrol membuat banyak negara mengambil tindakan cepat dalam pencegahan penyebaran virus di dalam negara.

---

<sup>10</sup> Clifton Martin dan Laura Jagla, "Integrating Diplomacy and Social Media," *Communications and Society Program, The Aspen Institute* (2013): hlm.5

<sup>11</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51320915> diakses pada 29 Oktober 2021

Sementara itu, perlindungan warga negara di luar negeri juga menambah permasalahan yang tidak dapat dikontrol oleh negara pasca pandemi. Bahkan pasca pandemi terjadi, ada banyak hal yang menjadi prioritas dan kepentingan dari negara dari berbagai sektor, terutama dalam menjaga keamanan dan kestabilan negara. Untuk mencapai keamanan dan kestabilan negara tersebut, upaya diplomasi perlindungan merupakan salah satu cara dalam mengidentifikasi, melindungi dan memberikan pelayanan bagi warga negara yang berada di negara lain.

Pemerintah Indonesia sendiri memiliki banyak prioritas dalam melakukan aktivitas diplomasi diplomasi, termasuk salah satunya adalah perlindungan warga negara di luar negeri. Berdasarkan pasal 1 Permenlu nomor 5 tahun 2018, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dapat didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Selain menjadi fungsi diplomasi, melindungi WNI juga merupakan amanat konstitusi Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.<sup>12</sup> Dengan demikian, upaya dan fokus bagi perlindungan menjadi salah satu tugas tambahan bagi Pemerintah Indonesia pasca pandemi.

Pada tahun 2020, berdasarkan kutipan dari website kemlu sendiri, prioritas diplomasi Indonesia di tahun 2020 mengalami *refocusing* menjadi:

- penguatan upaya perlindungan Warga Negara Indonesia,

---

<sup>12</sup> <https://www.liputan6.com/global/read/4648823/prioritas-diplomasi-indonesia-lindungi-wni-di-luar-negeri> diakses pada 10 Oktober 2021

- dukungan terhadap upaya penanggulangan pandemi baik dari aspek kesehatan maupun dampak sosial ekonomi, dan
- terus berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia.

Sementara itu, memasuki tahun 2021, Menlu Retno juga kembali menegaskan bahwa upaya perlindungan warga negara Indonesia tetap menjadi salah satu dari lima prioritas diplomasi Indonesia di tahun 2021.<sup>13</sup> Berdasarkan catatan selama tahun 2020, lebih dari 2.400 WNI mendapatkan pendampingan, lebih dari 172.000 WNI direpatriasi, 17 WNI dibebaskan dari hukuman mati, 4 sandera dibebaskan, dan Rp. 103,8 miliar hak finansial WNI/PMI telah diperjuangkan.<sup>14</sup> Retno Marsudi mengatakan pandemi tidak membuat diplomasi Indonesia terhenti, tetapi juga secara bersama, semua pihak harus berikhtiar dan optimis berkolaborasi menjalankan diplomasi.<sup>15</sup>

Perubahan dan perkembangan arus globalisasi pun membawa perubahan besar dalam komunikasi masyarakat global. Hal ini dirasakan oleh aktor-aktor dalam hubungan internasional seperti negara dalam mencapai tujuan dan kepentingan negara melalui aktivitas diplomasi. Sebagai contoh, *Twitter* digunakan sebagai salah satu alat diplomasi yang biasa digunakan oleh kepala negara dalam menanggapi suatu isu, sehingga para politisi atau kepala negara lain dapat *me-reply tweet* tersebut atau hanya sekedar memberikan opini mereka terhadap suatu isu. Penggunaan *twitter diplomacy* mengalami perkembangan dan sangat berbeda

---

<sup>13</sup> <https://kemlu.go.id/manama/id/news/10500/menlu-ri-sampaikan-capaian-politik-luar-negeri-indonesia-2020-dan-prioritas-diplomasi-2021> diakses pada 10 Oktober 2021

<sup>14</sup> Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2021 | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (kemlu.go.id)

<sup>15</sup> Menlu Sampaikan Program Prioritas Diplomasi RI di PPTM 2021 - Tribunnews.com

dengan diplomasi tradisional yang umumnya terikat dengan kesopanan dan formalitas. *Twitter* dan platform media sosial lainnya memungkinkan pejabat pemerintah untuk menyiarkan pandangan mereka terhadap suatu isu di ruang publik tanpa melalui jalur diplomatik formal yang biasa kita ketahui. Hal ini juga memungkinkan publik secara umum untuk menjangkau pejabat pemerintah dengan lebih mudah.<sup>16</sup>

Hadirnya perubahan dan perkembangan digital membuat aktivitas diplomasi menjadi lebih beragam sehingga dinilai lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Perlindungan WNI bukan permasalahan baru yang dihadapi Pemerintah Indonesia. Menurut Richa V.Y. Paramitaningrum dan Galuh Dian Prana Dewi<sup>17</sup>, diplomasi perlindungan oleh Pemerintah Indonesia, lebih terfokus pada upaya perlindungan secara hukum. Ketika WNI di luar negeri mengalami suatu permasalahan atau kasus, Pemerintah Indonesia pada umumnya melakukan pendampingan dan perlindungan secara hukum, sesuai dengan panduan hukum yang menjadi acuan selama ini. Selain itu, diplomasi perlindungan Indonesia terlihat lebih banyak untuk kasus-kasus seperti *overstayer* dan kasus TKI *undocumented*.

Sementara pasca pandemi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui kampanye digital #NegaraMelindungi, memulai upaya perlindungan WNI sejak bulan Maret 2020. Bentuk-bentuk dari upaya perlindungan tersebut antara lain dengan memberikan bantuan kemanusiaan seperti pemberian alat kesehatan,

---

<sup>16</sup> Radhika Chhabra, "Twitter Diplomacy: A Brief Analysis," No. 335 Januari 2020: hlm.3 [https://www.orfonline.org/research/twitter-diplomacy-a-brief-analysis-60462/#\\_ftn1](https://www.orfonline.org/research/twitter-diplomacy-a-brief-analysis-60462/#_ftn1)

<sup>17</sup> Richa V.Y. Paramitaningrum, Galuh Dian Prana Dewi. "Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri," *Global & Strategis*, Th. 12, No. 1, Januari – Juni 2018: hlm.35

bantuan logistik, juga bantuan-bantuan kesehatan lainnya turut diupayakan dan digalakkan melalui media sosial Kemlu, seperti *Instagram*, *Twitter*, dan *Facebook*. Selain itu, bentuk perlindungan WNI yang lain adalah dengan melakukan repatriasi atau pemulangan kembali warga negara ke negara asalnya. Hingga dengan saat ini, jumlah WNI yang mendapat bantuan kemanusiaan adalah sebanyak 767.609 orang, dan jumlah WNI yang direpatriasi sebanyak 232.986.<sup>18</sup>

Melalui perkembangan dunia digital dan teknologi komunikasi, terlihat bagaimana teknologi digital dan media sosial saat ini bukan hanya menjadi gaya hidup modern tetapi juga memiliki peran sebagai wadah dalam penyampaian informasi dan dalam aktivitas diplomasi negara. Pemanfaatan media digital bagi Indonesia di masa pandemi dalam upaya perlindungan WNI terlihat dari gerakan-gerakan yang di lakukan oleh Kemlu dalam tiap laman media sosialnya. Sehingga demikian, pengidentifikasian penulis bermuara kepada sebuah hipotesis bahwa media digital memiliki peran dalam menjalankan aktivitas diplomasi dan politik luar negeri Indonesia.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yang akan penulis paparkan adalah mengenai upaya diplomasi digital Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Dalam upaya perlindungan warga negara pasca pandemi ini, Kemlu melakukan diplomasi digital melalui beberapa aset digital yang dimiliki. Adapun pembatasan media digital yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah, media sosial yaitu *Instagram*, dan layanan digital seperti aplikasi Safe Travel dan Portal

---

<sup>18</sup> <https://negaramelindungi.kemlu.go.id/>

Peduli WNI. Ketiga platform tersebut berada di bawah tanggung jawab Kementerian Luar Negeri bersama dengan platform dan layanan yang lain. Perbedaan ketiga platform tersebut dengan platform milik Kemlu yang lain adalah di penggunaannya yang ditujukan kepada warga negara di luar negeri, sementara platform milik Kemlu yang lain ditujukan dan digunakan bagi warga negara dalam negeri. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sejak Januari 2020 hingga Desember 2021. Sementara itu, pembatasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2020 hingga 2021. Pembatasan waktu tersebut disesuaikan dalam konteks pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020, dan perlindungan terhadap WNI di luar negeri sudah stabil pada tahun 2021.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis akan memfokuskan penelitian terhadap upaya dan aktivitas diplomasi digital Pemerintah Indonesia dalam misi perlindungan warga negara pasca pandemi dengan pemanfaatan media digital. Maka penelitian ini memiliki perumusan masalah sebagai yaitu: ***“Bagaimana pemanfaatan media digital oleh Pemerintah Indonesia dalam perlindungan warga negara di luar negeri pasca pandemi Covid-19 tahun 2020-2021?”***

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana upaya Pemerintah Indonesia untuk mencapai salah satu kepentingan nasionalnya di masa pandemi, yaitu mengupayakan perlindungan WNI di luar negeri. Dunia digital

memiliki peranan yang besar dalam langkah penyampaian dan penyebaran informasi, juga sebagai alat untuk memantau keberadaan WNI di luar negeri. Sehingga dalam analisis, penulis berusaha untuk menjawab penelitian mengenai upaya diplomasi digital Indonesia dalam perlindungan WNI pasca pandemi Covid-19 dengan pemanfaatan media digital.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Secara akademis, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi para pengkaji masalah-masalah internasional dalam mengkaji aktivitas negara juga digitalisasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peranan media digital dalam mencapai kepentingan nasional negara. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan komparatif bagi penelitian sejenis, dan juga aspek-aspek yang belum diketahui dan terungkap di dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

### **1.4 Kajian Literatur**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa literatur terdahulu yang digunakan penulis sebagai sumber referensi penulisan serta guna membantu penulis dalam memahami permasalahan yang dibahas. Literatur-literatur tersebut dalam bentuk artikel jurnal dan juga laporan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebagai bahan acuan bagi penulis.

Kajian literatur pertama yang akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah "*The Communications and Internet Revolution in*

*International Relations*” oleh Elnur Hasan Mikhail dan Cavit Emre Aytakin. Dalam tulisannya, E.H Mikail menyatakan bahwa perkembangan dunia teknologi memiliki peranan dalam hubungan internasional dan politik.<sup>19</sup> Akibatnya, perkembangan dan kemajuan teknologi dapat dijadikan instrumen oleh negara untuk mengumpulkan kekuatan. Saat ini, internet sebagai bagian dari revolusi teknologi terbaru dapat membawa perubahan bagi jalannya politik internasional, dan bagi hubungan antar aktor di dalamnya. Revolusi komunikasi dan internet juga menjadi penentu bagi pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pengambil keputusan, selain itu juga untuk mengakses lebih banyak informasi. Dalam artikel jurnal tersebut juga menyebutkan bahwa di masa depan nanti, teknologi akan memiliki peran besar dalam membentuk jalannya hubungan internasional. Pemahaman mengenai pilihan geopolitik dan pilihan strategis negara juga akan mengalami perubahan dan memiliki instrumen baru. Dimana, perkembangan teknologi dan revolusi internet akan membentuk stuktur bagi negara dalam menentukan perilaku dan membentuk aliansi.<sup>20</sup>

Pembahasan mengenai perkembangan teknologi dan internet kemudian dijelaskan dalam artikel jurnal “*Digital Diplomacy and Its Effect on International Relations*” oleh Bridget Verrekia. Dalam tulisannya, Bridget Verrekia menyatakan bahwa perkembangan internet membawa perubahan besar di dunia, diantaranya untuk membantu memberikan akses informasi dan mengirim pesan secara cepat. Kemudian, inovasi-inovasi dan alat-alat digital baru juga nantinya akan digunakan

---

<sup>19</sup> Elnur Hasan dan Cavit Emre Aytakin, “*The Communications and Internet Revolution in International Relations*,” *Open Journal of Political Science* Vol.6 (2016): hlm.346

<sup>20</sup> *Ibid.*, 349

oleh pemerintah. Sebagai contoh, hadirnya sosial media baru, memudahkan para diplomat dan pemimpin dunia memperbesar jaringan diplomatis dan membangun hubungan yang strategis.<sup>21</sup> Selain itu, penggunaan diplomasi digital juga mengurangi biaya finansial dan penggunaan sumber daya, sehingga lebih efisien dan lebih hemat. Meskipun teknologi dapat menjadi aset yang memberikan benefit bagi yang menggunakannya, bukan menjadi sebuah keharusan bagi negara untuk mengganti semua bagian diplomasi. Negara-negara yang belum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru tidak perlu takut ketinggalan dalam sistem internasional karena bentuk diplomasi tradisional juga masih sama pentingnya. Selain itu, tidak ada juga yang memastikan dimana diplomasi digital akan memimpin dunia dalam beberapa tahun ke depan, tetapi diplomasi dipastikan akan tetap menjadi bagian penting dari aktivitas internasional.<sup>22</sup>

Dalam artikel jurnal yang berjudul “Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014-2019)” oleh Tryas Dharossa dan Teuku Rezasyah, menyebutkan bahwa pelayanan dan perlindungan WNI dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien dengan pemanfaatan media digital.<sup>23</sup> Besarnya jumlah WNI yang berada di luar negeri menjadi sebuah fokus tersendiri yang harus diperhatikan oleh pemerintah, dan juga berkaitan dengan upaya perlindungan warga negara yang berada di luar negeri. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Pemerintah

---

<sup>21</sup> Verrekia, Bridget, “Digital Diplomacy and Its Effect on International Relations” (2017). *Independent Study Project (ISP) Collection*: hlm.19

<sup>22</sup> Ibid., 28

<sup>23</sup> Tryas Dharossa dan Teuku Rezasyah, “Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014-2019),” *Padjajaran Journal of International Relations* Vol.2 No.1 (Mei 2020): 116

Indonesia menjalankan diplomasi digital dengan menggunakan 3 media digital. Diantaranya adalah *welcoming sms blast*, aplikasi *safe travel*, dan yang terakhir adalah portal peduli WNI. Hadirnya media digital digunakan untuk menghimpun data para WNI yang berkunjung ke luar negeri, mampu mengurangi jumlah WNI ilegal yang berada di Malaysia, dan juga memudahkan pemerintah dalam mendapatkan sebaran informasi mengenai lokasi dan pekerjaan WNI di luar negeri.

Literatur keempat yang digunakan adalah sebuah jurnal dengan judul “Diplomasi Digital Sebagai Dampak Pandemi Global Covid-19: Studi Kasus Diplomasi Indonesia Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)” oleh Muhammad Fikry Anshori.<sup>24</sup> Latar belakang dari artikel jurnal ini adalah keberadaan pandemi global COVID-19 yang memberikan dampak di berbagai bidang, termasuk pada bidang informasi dan teknologi dalam bentuk diplomasi digital. Di awal terjadinya pandemi, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York mulai mengambil langkah mitigasi resiko COVID-19. Koordinasi antar seluruh perwakilan Indonesia dilakukan untuk menanggapi dan meminimalisir penyebaran Covid-19 di Amerika Serikat. Koordinasi ini dijalankan dengan menggunakan *hotline* perwakilan Indonesia, serta aplikasi digital bernama *safe-travel*, yang menyajikan berbagai pemberitahuan dan informasi yang diperlukan WNI selama di luar negeri. Selain itu, aktivitas diplomasi digital Indonesia juga terjadi dalam beberapa pertemuan seperti pertemuan informal dengan Kelompok Kerja Perlucutan Senjata yang berisikan negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB),

---

<sup>24</sup> Muhammad Fikry Anshori, “Diplomasi Digital Sebagai Dampak Pandemi Global Covid-19: Studi Kasus Diplomasi Indonesia Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* Vol.3 No.2 (Januari-Juni 2020): 101

membahas kelaparan akibat konflik bersenjata pada pertemuan virtual DK PBB (21 April 2020) dan juga pertemuan dengan ECOSOC Operational Activities Segment (OAS) pada 19 Mei 2020.<sup>25</sup> Dengan demikian, meskipun sedang menghadapi pandemi global Covid-19, Indonesia tetap dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengumpulkan informasi, negosiasi, dan merespons berkaitan dengan isu yang sedang terjadi, dengan menggunakan pendekatan diplomasi digital.

Dengan melihat keempat literatur di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemanfaatan media digital dalam perkembangan ilmu telekomunikasi dan informasi juga memberi perubahan dalam hubungan internasional termasuk dengan aktivitas diplomasi terjadi. Hadirnya media sosial dan media digital memberikan bantuan kepada para utusan negara dalam mengumpulkan informasi, melakukan negosiasi, dan juga berpartisipasi terkait dengan isu-isu yang sedang terjadi. Namun, literatur-literatur di atas belum membahas secara mendalam mengenai sistem informasi dan layanan digital yang digunakan oleh Kementerian Luar Negeri dalam mengupayakan perlindungan terhadap warga negara di luar negeri. Selain itu pula, penelitian ini memfokuskan pada kondisi tertentu seperti pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas bagaimana sistem informasi dan layanan digital digunakan oleh Kementerian Luar Negeri dalam pencapaian tujuan diplomasi pasca pandemi terjadi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana pemanfaatan media digital sebagai instrumen oleh Indonesia dalam kepentingannya memberikan perlindungan terhadap WNI pasca pandemi Covid-19.

---

<sup>25</sup> Ibid., 113

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa konsep, yaitu diplomasi, diplomasi digital, *network society* dan *national interest*. Penulis akan mencoba menjelaskan dan menjabarkan permasalahan dalam penelitian dengan menggunakan konsep-konsep tersebut.

Diplomasi merupakan salah satu praktek dalam hubungan internasional yang biasa dilakukan oleh negara melalui perwakilan-perwakilan resmi. Diplomasi selalu mengalami perkembangan yang menyesuaikan dengan dinamika politik berkaitan dengan isu yang sedang terjadi. Dalam bukunya, Gerridge menyatakan bahwa diplomasi pada dasarnya merupakan aktivitas politik, dengan pemanfaatan sumber daya yang terampil sebagai sebuah kekuatan satu negara.<sup>26</sup> Diplomasi memiliki tujuan utama untuk memungkinkan negara dalam mengamankan tujuan kebijakan luar negeri tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan hampir sepenuhnya agen diplomatik profesional dan juga beberapa pejabat yang telah dirancang untuk mengamankan suatu perjanjian.<sup>27</sup>

Diplomasi juga berkaitan dengan pengelolaan hubungan antar negara dan negara dengan aktor lainnya. Dilihat dari perspektif negara, diplomasi berkaitan dengan menasehati, membentuk dan melaksanakan kebijakan luar negeri.<sup>28</sup> Dalam pelaksanaannya di lapangan, negara melalui perwakilan formal kemudian mengartikulasikan, mengkoordinasikan, dan mengamankan kepentingan tertentu,

---

<sup>26</sup> G.R. Berridge, "Diplomacy Theory and Practice Fifth Edition," *Palgrave Macmillan* (2015): 1

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> R.P. Barston, "Modern Diplomacy Fifth Edition," *Routledge Taylor & Francis* (2019): 1

melalui cara-cara seperti korespondensi, pembicaraan pribadi, pertukaran informasi, melihat, melobi, melakukan kunjungan, ancaman dan kegiatan terkait lainnya. Fungsi diplomasi dapat dibagi ke dalam enam bidang besar, yaitu: seremonial, manajemen, informasi dan komunikasi, negosiasi internasional, tugas perlindungan, dan kontribusi terhadap tatanan internasional.<sup>29</sup>

Seiring dengan perubahan dan perkembangan kemampuan manusia dan kemajuan ilmu teknologi dan komunikasi, konsep diplomasi juga mengalami banyak perkembangan. Salah satunya dengan hadirnya diplomasi digital yang juga mengikuti perkembangan ilmu teknologi. Diplomasi digital atau *e-diplomacy* secara luas diartikan sebagai penggunaan internet dan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai tujuan diplomatik.<sup>30</sup> Penggunaan diplomasi digital sangat erat kaitannya dengan penggunaan media sosial oleh perwakilan negara dalam mencapai tujuan dan kepentingan negara. Diplomasi digital dalam kaitannya dengan diplomasi suatu negara, dapat dilihat dari dua tingkatan utama, yaitu tingkat Kementerian Luar Negeri, dan tingkat perwakilan kedutaan besar. Menurut Hanson, diplomasi digital dapat dikaitkan dengan delapan tujuan umum, yaitu:<sup>31</sup>

1. *Knowledge management*: mengumpulkan informasi dari seluruh departemen pemerintahan, untuk mencapai tujuan nasional

---

<sup>29</sup> Ibid., 2

<sup>30</sup> Fergus Hanson, "Revolution @State: The Spread of Ediplomacy," *Lowy Institute for International Policy* (2012): 3

<sup>31</sup> Ibid., 4

2. *Public diplomacy*: menjaga komunikasi dengan warga negara luar negeri, dan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat yang lebih luas serta mempengaruhi media-media online lain
3. *Information management*: mengelola arus informasi dan menggunakannya untuk kepentingan pembuatan keputusan dan memprediksi perkembangan sosial politik yang ada
4. *Consular communication and responses*: menjadi alat komunikasi dengan warga yang tinggal di luar negeri terkait dengan kegiatan konsuler
5. *Disaster responses*: alat komunikasi yang efektif dalam merespon atau mengatasi bencana alam
6. *Internet freedom*: upaya untuk mendukung kebebasan berpendapat dan demokrasi
7. *External resource*: menciptakan mekanisme digital dan menciptakan peluang untuk mewujudkan kepentingan nasional
8. *Policy planning*: digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan koordinasi dan perencanaan dalam mewujudkan kepentingan nasional.

Secara sederhana, *The United Kingdom's Foreign and Commonwealth Office (FCO)*, mengelaborasi pengertian diplomasi digital sebagai bagaimana cara negara dan para diplomatnya menggunakan internet, *smartphone* dan media sosial sebagai bagian dari pengelolaan hubungan internasional, dalam kepentingan nasional negara sendiri.<sup>32</sup> Segala hal yang berhubungan dengan dunia digital seperti

---

<sup>32</sup> <https://www.gov.uk/government/speeches/diplomacy-in-the-digital-age>

internet, media sosial, *blog*, *smartphone*, merupakan bentuk lain dari komunikasi yang digunakan dalam melakukan diplomasi. Teknologi digital tentu sudah mengalami disrupsi dan mengubah diplomasi, terutama sebagai bagian dari diplomasi publik.

Marcus Holmes mendefinisikan diplomasi digital sebagai sebuah strategi mengelola perubahan melalui alat digital dan kolaborasi virtual.<sup>33</sup> Holmes berpendapat bahwa alat kolaborasi seperti teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan komunitas *online*, dapat membawa perubahan dalam sistem internasional. Dalam bukunya, Holmes menyatakan aktivitas dalam diplomasi digital dapat dilihat melalui tiga kategori, yaitu: *digital agenda-setting*, *digital presence-expansion*, dan *digital conversation-generating*.<sup>34</sup> Konsep yang juga akan digunakan dalam penelitian ini adalah *digital agenda-setting*, yang merupakan kemampuan media sosial untuk menyebarkan informasi kepada publik melalui agenda apa saja yang akan dibahas dalam platform digital.<sup>35</sup> Diplomasi digital dapat membantu melihat bagaimana perubahan bertahap berjalan yang dilihat dalam perkembangan sehari-hari dalam politik, seperti *mood* publik, perubahan emosi, dan perubahan keadaan.<sup>36</sup> Sehingga demikian, diplomasi digital dapat dilihat dengan jelas bagaimana penerapannya dalam aktivitas diplomasi negara.

Konsep *network society* yang dikemukakan oleh Manuel Castells dalam bukunya yang berjudul "*The Network Society: From Knowledge to Policy*",

---

<sup>33</sup> Cornelia Bjola dan Marcus Holmes, "Digital Diplomacy Theory and Practice," *Routledge New York: Taylor & Francis* (2015):15

<sup>34</sup> *Ibid.*, 72

<sup>35</sup> *Ibid.*, 74

<sup>36</sup> *Ibid.*, 21

menyatakan bahwa konsep *network society* secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah struktur sosial berdasarkan jaringan yang dioperasikan oleh teknologi informasi dan komunikasi berbasis mikroelektronika dan jaringan komputer digital yang menghasilkan, memproses, dan mendistribusikan informasi berdasarkan pengetahuan yang terakumulasi dalam sebuah jaringan.<sup>37</sup> Konsep ini juga hadir dengan adanya struktur sosial yang dihasilkan dari interaksi antara paradigma perkembangan teknologi dan organisasi sosial secara luas. Dimana konsep ini melihat bahwa *network society* didasarkan pada jaringan komunikasi yang tidak memiliki batasan, dan memiliki cakupan wilayah secara global. Jaringan komunikasi yang juga mengalami perkembangan dan membawa perubahan dalam masyarakat dunia baik dalam bidang sosial, bisnis, politik, budaya, komunikasi, dan ekonomi.

Diplomasi dan juga diplomasi digital memiliki kesinambungan dengan politik luar negeri suatu negara. Politik luar negeri dengan diplomasi memiliki relevansi yang kuat dalam melindungi dan mencapai kepentingan nasional, dimana politik luar negeri sebagai pengambil keputusan mengenai hubungan luar negeri, sedangkan diplomasi bertugas untuk menjalankan kewajiban agar berhasil. Dalam buku Robert Jackson dan Georg Sorensen, analisis kebijakan luar negeri adalah studi tentang manajemen hubungan eksternal dan kegiatan dari negara-bangsa, yang dibedakan dari kebijakan domestik mereka.<sup>38</sup> Kebijakan luar negeri melibatkan tujuan, strategi, ukuran, metode, pedoman, arahan, pemahaman,

---

<sup>37</sup> Manuel Castells & Gustavo Cardoso, "The Network Society: From Knowledge to Policy," *Center for Transatlantic Relations* (2005): 7

<sup>38</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, "Introduction to International Theory and Approaches," *Oxford University Press* (2013):252

perjanjian, dan sebagainya di mana pemerintah nasional melakukan hubungan internasional satu sama lain juga dengan organisasi internasional dan aktor non-pemerintah. Sejalan dengan kebijakan luar negeri, kepentingan nasional memiliki pengaruh yang sama dalam tujuan akhir aktivitas diplomasi suatu negara. Joseph S. Nye menyatakan bahwa dalam demokrasi, kepentingan nasional merupakan seperangkat prioritas bersama yang dibagikan kepada seluruh dunia.<sup>39</sup> Prioritas bersama tersebut bisa jadi bagian dari kepentingan strategis untuk negara, termasuk dengan nilai-nilai seperti hak asasi manusia dan demokrasi yang dianggap penting oleh publik.

Sejalan dengan penelitian ini, negara menjalankan aktivitas diplomasi dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan luar negeri. Tujuan tersebut salah satunya sejalan dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai berkaitan dengan upaya perlindungan warga negara. Sementara itu, hadirnya diplomasi digital juga untuk melengkapi sarana kebijakan politik luar negeri dengan instrumen yang baru, inovatif, dan diadaptasi sepenuhnya dengan memanfaatkan jaringan dan teknologi.<sup>40</sup> Dengan hadirnya bentuk diplomasi baru dengan pemanfaatan media digital ini, diharapkan pencapaian tujuan diplomasi akan menjadi lebih efektif dan efisien berdasarkan situasi dan kondisi pada saat pandemi.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Metode Penelitian**

---

<sup>39</sup> Joseph S. Nye Jr., "Redefinig the National Interest," *Council on Foreign Relations* Vol.78 No.4 (Juli-Agustus 1999): 23

<sup>40</sup> Humphrey Wangke, "Diplomasi Digital dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia," *Yayasan Pustaka Obor Indonesia* (2020): 111

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode dengan model kualitatif dan tipe analisis isi. Metode penelitian kualitatif mempunyai ciri dan penekanan pada *proses*. *Proses* berarti melihat bagaimana fakta, realita, gejala dan peristiwa itu terjadi dan dialami.<sup>41</sup> Dimana inti dari proses yaitu memahami dinamika internal tentang bagaimana suatu program, organisasi atau hubungan itu terjadi. Keunggulan metode kualitatif juga dapat dilihat dari data yang sangat mendasar karena berdasarkan fakta, peristiwa dan realita. Selain itu, pembahasannya juga mendalam dan terpusat, karena datanya digali secara mendalam. Analisis isi atau data sendiri berarti mengatur secara sistematis bahan hasil dari observasi, menafsirkan dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.<sup>42</sup> Analisis juga berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit yang lebih kecil, dan mencari pola dan tema yang sama. Penelitian ini juga akan berfokus dengan mengumpulkan data-data seperti dokumen dan media massa konvensional. Data-data ini kemudian yang akan dikumpulkan untuk mendeskripsikan dan menjabarkan aktivitas diplomasi digital Indonesia.

### 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber lain. Data diperoleh peneliti secara tidak langsung namun menggunakan sumber-sumber lain berupa tulisan. Dengan penggunaan metode ini, maka data yang relevan dikumpulkan dengan cara penelitian literatur dan dokumen. Selain itu,

---

<sup>41</sup> J. R. Raco, "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya," *Gramedia Widiasarana Indonesia* (2010): 61-63

<sup>42</sup> *Ibid.*, 121-122

pengumpulan data juga dilakukan dengan metode studi internet, seperti *website* resmi milik pemerintah Indonesia, juga *website* dan sumber berita yang kredibel. Peneliti menggunakan literatur berupa artikel jurnal dan buku untuk mendukung teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggumpulkan data berbasis dokumen untuk mendukung data mengenai perkembangan isu yang sedang diteliti, dan untuk mendapatkan data yang aktual, akurat juga relevan.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Penyusunan penelitian ini akan terbagi dalam empat bab, dimana setiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab 1. Pada bab satu penulis akan menjelaskan mengenai topik dengan lingkup permasalahannya. Bab ini akan diawali dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah berupa pertanyaan penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur yang berisi dengan artikel jurnal dengan topik dan pembahasan yang juga berkaitan dengan topik penelitian ini, kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar penjelasan terhadap fenomena, metode penelitian, jenis penelitian dan teknik pengumpulan data, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab 2. Pada bab dua penulis mendeskripsikan tentang kondisi dan situasi pandemi, dimulai dari awal permasalahan, penyebaran, hingga menjadi sebuah pandemi global. Juga akan berisi mengenai respon dari negara dalam menghadapi situasi tersebut. Dalam bab ini juga akan mendeskripsikan bagaimana kecenderungan politik luar negeri Indonesia terkait dengan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), terlebih di bawah pemerintahan Joko Widodo. Terakhir,

pada bab ini juga akan mendeskripsikan mengenai bagaimana diplomasi digital di Indonesia sendiri. Hal ini berhubungan melihat bagaimana perkembangan diplomasi digital juga dengan perkembangan dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi, sehingga diplomasi digital sudah mulai banyak diterapkan di banyak negara, tak terkecuali di Indonesia.

Bab 3. Pada bab tiga penulis akan membahas upaya yang dilakukan Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya di masa pandemi, salah satunya perlindungan warga negara. Penulisan pada bab ini akan diawali dengan membahas kebijakan luar negeri Indonesia terkait dengan perlindungan warga negara. Setelah itu, bab ini akan membahas mengenai bagaimana peranan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menjalankan diplomasi digital di Indonesia dan implementasinya pada media digital. Juga akan dilengkapi dengan data-data dan angka yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas media sosial oleh akun resmi dari Kemlu. Bab ini juga akan bertujuan dalam menjawab pertanyaan penelitian dan juga mengimplementasikan konsep-konsep seperti yang sudah disebutkan dalam kerangka pemikiran.

Bab 4. Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan penelitian